

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
VISI DAN MISI UNIVERSITAS PASUNDAN	iv
VISI DAN MISI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PASUNDAN	v
VISI DAN MISI PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK UNIVERSITAS PASUNDAN	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO HIDUP.....	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
RINGKESAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Konteks Penelitian.....	1
1.2 Fokus Penelitian	7
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Kegunaan Penelitian	9
1.5.1 Kegunaan Teoritis	9

1.5.2 Kegunaan Praktis	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN & PROPOSISI	10
2.1 Kajian Pustaka	10
2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	10
2.1.2 Konsep Administrasi Publik	16
2.1.3 Konsep Kebijakan Publik	19
2.1.3.1 Definisi Kebijakan	19
2.1.3.2 Definisi Kebijakan Publik.....	20
2.1.3.3 Jenis Kebijakan Publik.....	22
2.1.3.4 Proses Kebijakan.....	23
2.1.4 Implementasi Kebijakan	24
2.1.4.1 Pengertian Implementasi Kebijakan	24
2.1.4.2 Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan.....	27
2.1.4.3 Unsur-Unsur Proses Implementasi Kebijakan	28
2.1.4.4 Model Implementasi Kebijakan Publik.....	29
2.1.5 Konsep Gelandangan dan Pengemis.....	40
2.2 Kerangka Pemikiran.....	44
2.3 Proposisi	46
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	47
3.1 Objek Penelitian	47
3.1.1 Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Bandung.....	47
3.1.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandung.....	48
3.1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan deskripsi kerja Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung	49
3.1.3.1 Tugas Pokok Dinas Kota Bandung	49

3.1.3.2 Fungsi Dinas Sosial Kota Bandung.....	50
3.1.3.3 Deskripsi Kerja Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung.....	50
3.1.4 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandung	54
3.1.5 Data Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung	55
3.1.6 Jenis-jenis program Dinas Sosial Kota Bandung.....	57
3.2 Metode Penelitian	61
3.2.1 Desain Penelitian	61
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	62
3.2.3 Informan.....	64
3.2.4 Operasional Parameter	66
3.2.5 Teknik Analisis Data	67
3.2.6 Pemeriksaan Keabsahan Data	69
3.2.7 Jadwal Penelitian	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
4.1 Hasil Penelitian	73
4.2 Pembahasan	75
4.2.1 Implementasi Kebijakan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dinas Sosial Kota Bandung (Studi Kasus Gelandangan dan pengemis).....	76
4.2.1.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan.....	77
4.2.1.2 Sumber Daya	87
4.2.1.3 Karakteristik Agen Pelaksana	95
4.2.1.4 Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana (Disposisi).....	106
4.2.1.5 Komunikasi Antar Organisasi	116
4.2.1.6 Lingkungan ekonomi, Sosial, dan Politik.....	126

4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dinas Sosial Kota Bandung pada kasus gelandangan dan pengemis	138
4.2.2.1 Faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dinas Sosial Kota Bandung pada kasus gelandangan dan pengemis.....	138
4.2.2.2 Faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dinas Sosial Kota Bandung pada kasus gelandangan dan pengemis.....	144
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	148
5.1 Kesimpulan	148
5.2 Saran.....	152
5.2.1 Saran Akademis	152
5.2.2 Saran Praktis	153
DAFTAR PUSTAKA.....	154
LAMPIRAN.....	158

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3. 1 Data Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung berdasarkan Unit Kerja ...	55
Tabel 3. 2 Data Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung berdasarkan Jenis Kelamin	56
Tabel 3. 3 Data Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung berdasarkan Pendidikan ..	56
Tabel 3. 4 Daftar Informan.....	65
Tabel 3. 5 Operasional Parameter	67
Tabel 3. 6 Jadwal Penelitian.....	72
Tabel 4. 1 Data gelandangan dan pengemis dari tahun 2022-2024.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Implementasi Kebijakan Jeffrey Pressman dan Aaron Wildavsky.....	30
Gambar 2. 2 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn.....	32
Gambar 2. 3 Model Implementasi Kebijakan Menurut Charles Jones (Diadaptasi Penulis).....	33
Gambar 2. 4 Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1983)..	34
Gambar 2. 5 Model Implementasi Kebijakan Menurut Brian W. Hoodwood & Lewis A. Gun	36
Gambar 2. 6 Model Hubungan Antarvariabel Implementasi Kebijakan Edward III	37
Gambar 2. 7 Implementations as a political and administrative process.....	38
Gambar 2. 8 Model Implementasi Kebijakan menurut Rippley dan Franklin (diadaptasi penulis buku)	40
Gambar 2. 9 Kerangka Berpikir	45
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandung	54
Gambar 3. 2 Model Analisis Data Kualitatif Milles dan Huberman	68
Gambar 4. 1 (a) Sasaran Rehabilitasi Sosial, (b) tempat pemberian Layanan Rehabilitasi Sosial, (c) Pelayanan yang diterima (d) Kriteria Rehabilitasi sosial Dasar bagi Gepeng	80
Gambar 4. 2 Integrasi Layanan (Layanan Rehabilitasi Sosial).....	81
Gambar 4. 3 Tahapan Rehabilitasi Sosial.....	83
Gambar 4. 4 Tujuan Rehabilitasi sosial.....	86
Gambar 4. 5 Tujuan Rehabilitasi Sosial	86
Gambar 4. 6 Profil Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial	89
Gambar 4. 7 Rumah Singgah & Fasilitas Ruang kamar	93
Gambar 4. 8 Penyediaan alat bantu dan sandang.....	93
Gambar 4. 9 Penyediaan permakanan & Pemeriksaan Kesehatan.....	93
Gambar 4. 10 Bimbingan Fisik & Bimbingan Spiritual	94

Gambar 4. 11 Alur Penjangkauan PPKS dari laporan dan pengaduan Masyarakat	101
Gambar 4. 12 Alur kegiatan penjangkauan & Pemantauan PPKS di Jalanan.....	102
Gambar 4. 13 kegiatan USB Ketika Penjangkauan	102
Gambar 4.14 Kegiatan pekerja sosial melakukan kontrak kepada ppks & pendampingan pengecekan Kesehatan sebelum dimasukkan kerumah singgah.	103
Gambar 4. 15 Kegiatan pekerja sosial melakukan kontrak kepada ppks & pendampingan pengecekan Kesehatan sebelum dimasukkan kerumah singgah.	104
Gambar 4. 16 Penyuluh sosial memberikan bimbingan sosial, memberikan informasi kepada PPKS Jalanan.....	104
Gambar 4. 17 Memberikan penyuluhan kepada Masyarakat lewat Sosial media	105
Gambar 4. 18 Penyuluh Sosial memberikan penyuluhan kepada Gepeng yang akan diantar pulang	110
Gambar 4. 19 PPKS menolak ngkau oleh Satpol PP dan tim USB	115
Gambar 4. 20 Konsultasi dan pengaduan.....	115
Gambar 4. 21 (a) Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Gambar, (b) koordinasi dengan satpol pp terkait penjangkauan, (c) koordinasi dengan dishub.....	125
Gambar 4. 22 Masyarakat memberi sejumlah uang kepada gepeng.....	132
Gambar 4. 23 Hotline & Tata cara melaporkan	133
Gambar 4. 24 SK Walikota dibentuknya USB.....	136
Gambar 4. 25 Luas wilayah Dinas Sosial Kota Bandung	136

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Observasi	158
Lampiran 2. Pedoman Wawancara.....	158
Lampiran 3. Surat Perizinan.....	161
Lampiran 4. Dokumentasi dengan Narasumber.....	164